

BAB II

TINJUAN TEORITIS

2. 1 Kajian Teoritis

2. 1. 1 Pemberdayaan Masyarakat

2. 1. 1. 1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sumaryadi, (2005:11) pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan social berkelanjutan. Selain itu pengertian pemberdayaan masyarakat lainnya menurut Sumaryadi sebagai berikut:

- 1) Membantu pengembangan manusia yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan.
- 2) Memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara social ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka sendiri, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Menurut Widjaja (2003:169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, social, agama dan budaya.

Menurut Abu Huraerah (2008:87) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi

memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki.

Menurut Zulkarnain (2010) pemberdayaan adalah upaya untuk membangun, mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya mengembangkannya. Untuk itu maka diperlukan suatu program bagi masyarakat yang kurang berdaya.

Menurut Soekanto (1987) Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu kelompok masyarakat agar mampu berbuat sesuai harkat dan martabatnya dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat.

2. 1. 1. 2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto (2015), terdapat 6 tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu:

1) Perbaikan Kelembagaan

Dengan perbaikan kegiatan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelembagaan yang ada, sehingga lembaga tersebut dapat secara maksimal menjalankan fungsinya. Dengan begitu tujuan lembaga tersebut akan mudah dicapai. Target yang telah disepakati oleh seluruh anggota dalam lembaga tersebut juga akan mudah terealisasi.

Lembaga yang baik mempunyai visi, misi, tujuan yang jelas, sasaran yang dapat diukur, program kerja yang terarah. Semua anggota lembaga melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diserahkan kepada masing-masing anggota secara jelas pada setiap periode waktu tertentu sesuai kompetensi masing-masing. Dengan begitu setiap anggota yang terlibat dalam kegiatan merasa berdaya dan merasa mempunyai peran untuk memajukan lembaga yang bersangkutan. Para anggota dapat saling memberikan motivasi untuk selalu meningkatkan kemampuannya melalui pengetahuan, pengalaman

dan keterampilan dari waktu ke waktu.

2) Perbaikan Usaha

Setelah kelembagaan mengalami perbaikan, maka diharapkan adanya perbaikan bisnis dari lembaga tersebut. Di samping perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki usaha yang dilakukan yang mampu memberikan kepuasan kepada seluruh anggota lembaga tersebut dan memberikan manfaat yang luas kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Hal ini juga diharapkan mampu mengembangkan lembaga tersebut, sehingga mampu memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh seluruh anggota yang bersangkutan.

3) Perbaikan Pendapatan

Perbaikan usaha diharapkan akan berimplikasi kepada peningkatan pendapatan dari seluruh anggota lembaga tersebut. Dengan kata lain terjadinya perbaikan usaha yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

4) Perbaikan Lingkungan

Lingkungan saat ini banyak mengalami kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia. Padahal bila kualitas manusia tinggi, yang salah satu faktornya adalah memiliki pendidikan yang tinggi atau memiliki intelektual yang baik, maka manusia tidak akan merusak lingkungan.

Sebagai contoh, suatu daerah menurut ketentuan ilmu pengetahuan yang berkembang harus memiliki ruang terbuka hijau sebanyak kurang lebih 40%, hal ini berarti masyarakat diharapkan tidak sembarangan menebang pohon yang dapat menyebabkan banjir atau longsor. Dengan demikian kondisi lingkungan fisik akan terjaga. Contoh lainnya, sebuah pabrik yang milik seorang pengusaha harus memperhatikan pembuangan limbah pabrik yang diperoleh dari hasil produksi barang yang dihasilkannya. Dalam hal ini pengusaha harus bertanggung jawab untuk tidak membuang limbah ke sungai atau jalan yang dapat menyebabkan tanah atau air disekitarnya tercemar oleh

zat yang membahayakan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu pendapatan masyarakat harus cukup untuk dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik.

Ketika kemiskinan terjadi, maka untuk memenuhi kebutuhannya, manusia mungkin melakukan tindakan yang merusak lingkungan, karena terpaksa untuk menghidupi diri dan keluarganya. Sehingga perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan fisik dan social karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang rendah.

5) Perbaikan Kehidupan

Tingkat kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indicator atau berbagai factor. Diantaranya tingkat kesehatan, pendidikan dan pendapatan atau daya beli masing-masing keluarga. Dengan pendapatan yang membaik diharapkan ada korelasi dengan keadaan lingkungan yang membaik pula. Pada akhirnya pendapatan dan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

6) Perbaikan masyarakat

Bila setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik, maka akan menghasilkan kehidupan kelompok masyarakat yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik berarti didukung oleh lingkungan fisik dan social yang lebih baik, sehingga diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

2. 1. 1. 3 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, perlu diperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai kesuksesan program pemberdayaan masyarakat terdapat 4 prinsip merujuk pada pendapat Najiyanti, dkk (2014), yaitu:

1) Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan

masyarakat yaitu adanya kesetaraan kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun ialah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing individu saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar, saling membantu, saling tukar pengalaman dan saling memberikan dukungan. Pada akhirnya seluruh individu yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan itu mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarganya.

2) Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat ialah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri. Untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendampingan yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat. Artinya masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan mendapat arahan yang jelas dari pendamping, sehingga mampu memotivasi dirinya untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang ada pada masing-masing individu.

3) Prinsip Keswadayaan dan Kemandirian

Prinsip ini lebih menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit.

Mereka memiliki kemampuan untuk menabung pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang

bersifat material harus dipandang sebagai penunjang sehingga pemberian bantuan tidak melemahkan tingkat keswadayaannya.

4) Prinsip Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang agar dapat berkelanjutan, walaupun awalnya peran pendamping lebih dominan dibandingkan masyarakat sendiri. Secara perlahan, peran pendamping akan semakin berkurang karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatan sendiri. Artinya program kegiatan pemberdayaan ini dirancang secara bertahap agar mampu memberikan pemahaman, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kepada setiap individu yang terlibat dalam program kegiatan pemberdayaan tersebut. Kemudian, masing-masing individu mampu menggali dan mengembangkan potensi mereka untuk melakukan aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

2. 1. 1. 4 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Soekanto (1987:63) pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu:

1) Tahap Persiapan

Tahap ini adalah tahap pertama yang harus dikerjakan, menyiapkan petugas tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community worker. Lalu menyiapkan lapangan yang pada dasarnya dilakukan secara nondirektif. Tahap ini sangat penting agar efektivitas program atau kegiatan pemberdayaan dapat tercapai dengan baik.

2) Tahap Pengkajian

Tahap ini merupakan proses pengkajian, dapat dilakukan secara individu melalui kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan dan sumber daya yang dimiliki klien. Dengan begitu program yang dilakukan tidak salah sasaran, artinya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada pada masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tahapan ini juga sangat penting

agar efisien program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

3) Tahap Perencanaan Alternatif Program atau kegiatan

Pada tahap ini petugas sebagai agen perubahan yang secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternative program dan kegiatan yang dapat dilakukan. Beberapa alternative harus menggambarkan kelebihan dan kekurangannya, sehingga alternative program yang dipilih dapat menunjukkan program kegiatan yang paling efektif dan efisien agar tercapai tujuan pemberdayaan masyarakat.

4) Tahap Pemformalisasi Rencana Aksi

Pada tahap ini agen perubahan membantu kelompok untuk merumuskan dan menentukan program kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Selain itu juga agen perubahan membantu memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis terutama yang ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana. Dengan demikian penyandang dana akan paham terhadap tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan tersebut.

5) Tahap Implementasi Program atau Kegiatan

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik dapat melenceng saat di lapangan. pada tahap ini agar seluruh peserta dapat memahami secara jelas maksud, tujuan dan sarannya, maka program itu terlebih dahulu akan disosialisasikan, sehingga dalam implementasinya tidak menghadapi kendala yang berarti.

6) Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pewangsan program pemberdayaan

masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek dapat terbentuk system komunitas untuk pengawasan secara internal. Untuk jangka waktu panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pada tahap evaluasi ini diharapkan dapat diketahui secara jelas dan terukur seberapa besar keberhasilan program ini tercapai, sehingga kendala yang akan dihadapi berikutnya bisa di antisipasi untuk pemecahan permasalahan yang akan dihadapi selanjutnya.

7) Tahap Terminasi

Tahap ini merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti. Artinya masyarakat yang diberdayakan telah mampu mengatur dirinya untuk bisa hidup lebih baik dengan mengubah situasi kondisi sebelumnya yang kurang bisa menjamin kelayakan hidup bagi dirinya dan keluarganya.

2. 1. 1. 5 Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sangat penting, karena masyarakat di setiap daerah atau negara tidak semuanya memiliki kesejahteraan yang sama. Pada umumnya masyarakat yang memiliki kesejahteraan tinggi memiliki kemandirian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama menjalani kehidupannya, sehingga tidak tergantung kepada pihak lain. Sedangkan masyarakat yang kesejahteraannya tergolong menengah kebawah biasanya memerlukan bantuan dari pihak lain, baik pemerintah, para dermawan dan komponen masyarakat lainnya. Oleh sebab itu pemerintah harus memperhatikan masyarakat menengah kebawah untuk memenuhi kebutuhan hidup agar bisa hidup layak.

Bantuan dari pihak lain kepada masyarakat yang belum mampu mandiri tersebut harus bersifat mendidik, agar dapat membantu masyarakat mandiri sepenuhnya. Artinya mental mereka harus dibina untuk bisa bekerja lebih baik,

sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara bertahap di masa mendatang dapat mandiri sepenuhnya.

2. 1. 1. 6 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja demi tercapainya suatu keberhasilan. Ada lima aspek penting yang dapat dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya melalui pelatihan dan dukungan terhadap masyarakat miskin, yaitu :

1) Motivasi

Dalam pemberdayaan setiap individu harus dapat memahami nilai kebersamaan, oleh karena itu perlu didorong untuk membentuk kelompok yang berguna untuk mengorganisasi dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di desa. Kelompok ini kemudian di beri motivasi untuk terlibat langsung dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber atau kemampuan mereka sendiri.

2) Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan

Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan mata pencaharian sendiri bahkan bisa dapat membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan diluar.

3) Manajemen Diri

Setiap kelompok masyarakat harus memilih pemimpin untuk kelompoknya sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti halnya mengadakan pertemuan/musyawarah, mengadakan pencatatan data, mengatasi konflik, serta manajemen masyarakat lainnya.

4) Pembangunan dan Pengembangan Jejaring

Pengorganisasian kelompok masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan dengan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial disekitarnya. Jaringan

ini berguna dalam menyediakan atau mengembangkan akses terhadap sumber dan kesempatan pemberdayaan rakyat miskin.

2. 1. 2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

2. 1. 2. 1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut UUD 1945 yang dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatkan pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke UU No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih

besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

2. 1. 2. 2 Kriteria UMKM

Menurut Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah).

2. 1. 2. 3 Kebijakan Pemerintah

UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dari system perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industry berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan. Sudah selayaknya UMKM dilindungi dengan UU dan peraturan yang terkait dalam kegiatan oprasional dan pengembangannya.

Beberapa peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi UMKM diantaranya UUD 1945 yang merupakan pondasi dasar hukum di Indonesia Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), Pasal 33, UU No.9 Tahun 1995, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan, Peraturan Presiden No.5 Tahun 2007 mengenai program Kredit Usaha Kecil bagi pembiayaan oprasional UMKM, UU No.20 Tahun 2008 tentang perdayaan UMKM bagi perekonomian di Indonesia dan yang terbaru adalah Paket 4 Kebijakan Ekonomi “Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas” bagi UMKM.

Pada tanggal 11 Maret 2014, Indonesia secara resmi telah mengesahkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Salah satu sector yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 adalah pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Berdasarkan Bab X Pasal 73 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014, pemberdayaan mikro, kecil dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat berupa :

- 1) Pemberian fasilitas

- 2) Insentif
- 3) Bimbingan Teknis
- 4) Akses atau bantuan permodalan
- 5) Bantuan Promosi dan pemasaran

Selain itu, dalam pasal 73 ayat (3) juga menyebutkan bahwa pemerintah atau pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan dapat bekerja sama dengan pihak lain, antara lain perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

2. 1. 2. 4 Modal Usaha

Modal usaha adalah mutlak diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha. Oleh karena itu diperlukan sejumlah dana sebagai dasar ukuran finansial atas usaha yang digalakan. Dalam menjalankan usaha salah satu factor pendukung yang dibutuhkan adalah modal, jika di ibaratkan dengan membangun sebuah rumah maka modal menjadi bagian pondasi sebuah rumah yang akan dibangun.

Semakin kuat pondasi yang dibuat maka akan semakin kokoh rumah yang akan dibangun. Modal yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis antara lain tekad, pengalaman, keberanian, pengetahuan, dan tentunya modal uang. Namun kebanyakan orang terhambat memulai usaha karena mereka sulit untuk mendapatkan modal uang. Modal usaha terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

- 1) Modal Investasi, adalah jenis modal usaha yang harus dikeluarkan biasanya dipakai dalam jangka panjang. Nilainya cukup besar karena dipakai untuk jangka panjang namun modal investasi akan menyusut dari tahun ke tahun bahkan bisa dari bulan ke bulan.
- 2) Modal kerja, yang dikeluarkan untuk membuat atau membeli barang dagangan. Modal ini dapat dikeluarkan tiap bulan atau pada waktu tertentu.
- 3) Modal operasional, modal yang dikeluarkan untuk membayar biaya operasional bulanan misalnya pembayaran gaji pegawai, listrik, dan lainnya.

2. 1. 2. 5 Strategi Pemasaran

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh para pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan perkembangan usahanya dan mendapatkan laba. Berhasil tidaknya dalam pencapaian tujuan tergantung pada kemampuan dan keahlian di bidang pemasaran. Menurut Basu Swasta & Irawan, (1990) Dalam pencapaian tujuan perlu adanya strategi pemasaran yaitu suatu rencana yang dimiliki oleh perusahaan sebagai pedoman bagi kegiatan pemasaran guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Dalam memulai menjalankan bisnis, diperlukan rencana strategi pemasaran awal untuk memperkenalkan produk baru ke pasar. Rencana tersebut terdiri dari tiga bagian, yang pertama adalah posisi produk, pangsa pasar. Yang kedua adalah tentang strategi distribusi dan anggaran. Ketiga adalah melakukan strategi bauran pemasaran yaitu strategi mengenai harga, distribusi, produk, promosi yang akan dilakukan.

Menurut Corey dalam Fandy Tjiptono (2008) strategi pemasran terdiri dari lima elemen yang sangat berkaitan, yaitu :

1. Pemilihan pasar yang akan dilayani, keputusan ini didasarkan pada factor
 - a) Persepsi terhadap fungsi produk dan pengelompokan teknologi yang dapat diproteksi dan didominasi.
 - b) Keterbatasan sumber daya internal yang mendorong perlunya pemusatan yang lebih sempit.
 - c) Pengalaman komulatif yang di dasarkan pada trial and error didalam menanggapi peluang dan tantangan.
 - d) Kemampuan khusus yang berasal dari akses terhadap sumber daya langka atau pasar yang terproteksi.
2. Perencanaan produk, meliputi produk spesifik yang dijual, pembentukan lini rproduk dan desain penawaran individual pada masing-masing lini. Produk itu menawarkan manfaat total yang dapat diperoleh pelanggan dengan melakukan pembelian. Manfaat tersebut meliputi produk itu sendiri,

nama merek produk, ketersediaan produk, jaminan atau garansi, jasa reparasi, dan bantuan teknis yang disediakan penjual, serta hubungan personal yang mungkin terbentuk di antara pembeli dan penjual.

3. Penetapan harga, yaitu menentukan harga yang dapat mencerminkan nilai kuantitatif dari produk kepada pelanggan.
4. System distribusi yaitu saluran perdagangan grosir dan eceran yang dilalui produk hingga mencapai konsumen akhir yang membeli dan menggunakannya.
5. Komunikasi pemasaran yang meliputi periklanan, personel selling, promosi penjual, direct marketing dan public relations.

Kemampuan strategi pemasaran suatu perusahaan untuk menanggapi setiap perubahan kondisi pasar dan factor biaya tergantung pada analisis faktor-faktor berikut :

1. Factor lingkungan, pertumbuhan populasi dan peraturan pemerintah sangat penting untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan pada bisnis perusahaan. Selain itu factor perkembangan teknologi, tingkat inflasi, dan gaya hidup juga tidak boleh diabaikan.
2. Factor pasar, setiap perusahaan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan seperti ukuran pasar, tingkat pertumbuhan, tahap perkembangan, trend dalam system distribusi, pola perilaku pembeli, permintaan musiman, segmen pasar yang ada atau dapat dikembangkan lagi, dan peluang yang belum terpenuhi.
3. Persaingan, setiap perusahaan perlu memahami siapa pesaingnya, bagaimana posisi produk/pasar pesaing tersebut, apa strategi mereka, kekuatan dan kelemahan pesaing, struktur biaya pesaing dan kapasitas produksi para pesaing.
4. Analisis kemampuan internal, setiap perusahaan perlu menilai kekuatan dan kelemahannya dibandingkan para pesaingnya. Penilaian tersebut dapat didasarkan pada factor seperti teknologi, sumber daya finansial, kemampuan pemanufakturan, kekuatan pemasaran, dan basis pelanggan

yang dimiliki.

5. Perkembangan usaha, dilakukan oleh usaha yang sudah mulai berproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi, perkembangan usaha kecil menengah adalah kemampuan seorang pengusaha kecil untuk mensosialisasikan dirinya kepada kebutuhan pangsa pasar sehingga ada perbaikan taraf hidup pada diri seorang pengusaha. Perkembangan usaha bagi UMKM sebagai kesuksesan dalam berusaha yang dapat dilihat jumlah penjualan yang semakin meningkat dikarenakan dari kemampuan pengusaha dalam meraih peluang usaha yang ada, berinovasi, luasnya pasar yang dikuasai, mampu bersaing, mempunyai akses yang luas terhadap lembaga keuangan baik bank atau non bank sehingga dapat meningkatkan pembiayaan usahanya.

2. 1. 3 Sosial Ekonomi

2. 1. 3. 1 Pengertian Sosial Ekonomi

Social menurut KBBI adalah hal yang berkenaan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan umum. Social juga dapat dikatakan sebuah perilaku manusia yang berhubungan satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan di dalam hidupnya masing-masing baik kebutuhan sandang, pangan dan papan. Sedangkan ekonomi dapat diartikan sebagai perilaku manusia dalam mencari alat pemuas kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupannya.

Menurut Soerjono Soekanto (2007:89) social ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak serta kewajibannya dalam berhubungan dengan sumber daya. Menurut Soekanto (2001:237) menyatakan bahwa komponen pokok kedudukan social ekonomi meliputi ukuran kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan.

Menurut Polak dalam Abdulsyani (2007:91) status kedudukan memiliki

dua aspek yaitu aspek structural yang bersifat hierarkis yang artinya aspek ini secara relative mengandung perbandingan tinggi atau rendahnya terhadap status lain. Sedangkan aspek yang kedua adalah aspek fungsional atau peranan social yang berkaitan dengan status yang dimiliki seseorang. Dengan memiliki status seseorang dapat berinteraksi dengan baik terhadap individu lain baik status yang sama ataupun status yang berbeda. Bahkan banyak pergaulan sehari-hari seseorang tidak mengenal seseorang secara individu, namun hanya mengenal status individu tersebut. Maka kedudukan atau status posisi tempat seseorang sangat berarti dalam sebuah kelompok social. makin tinggi kedudukan seseorang maka makin tinggi pula dalam memperoleh fasilitas yang diperlukan dan diinginkan.

Menurut George Soul, ekonomi adalah pengetahuan social yang mempelajari tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat khususnya dengan usaha memenuhi kebutuhan dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan (Richard G. Lipsey dan Pete O Steiner. 1991:9)

Status social ekonomi menurut Mayer (Soekanto, 2007:207) berarti kedudukan suatu individu dan keluarga berdasarkan unsur-unsur ekonomi. Sedangkan menurut FS. Chapin (kaare, 1989:26) mengungkapkan status social ekonomi merupakan posisi yang ditempati individu atau keluarga yang berkenaan dengan ukuran rata-rata yang umum berlaku tentang kepemilikan kultura, pendapatan efektif, pemilikan barang dan partisipasi dalam aktifitas kelompok dari komunitasnya.

Kondisi ekonomi sangat berperan penting dalam pendidikan seorang anak. Menurut Gerungan (2009:196) peranan kondisi ekonomi dalam pendidikan anak memegang satu posisi yang sangat penting. Dengan adanya perekonomian yang cukup memadai, lingkungan material yang dihadapi anak dalam keluarganya jelas lebih luas, maka akan mendapat kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan kecakapan yang tidak dapat dikembangkan tanpa adanya sarana dan prasarana. Factor social orang tua bisa terbawa ke

lingkungan sekolah jika seorang siswa tidak mampu mengendilakan motivasi belajarnya dan orang tua tidak mampu memberikan semangat lebih akan pentingnya belajar.

Maka dapat disimpulkan kondisi social ekonomi adalah suatu posisi, kedudukan, jabatan, kepemilikan yang dimiliki seorang individu ataupun kelompok yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, pendapatan, kepemilikan aset rumah tangga dan pemenuhan kebutuhan keluarga dan pekerjaan yang dimiliki akan sangat mempengaruhi status social seseorang, kelompok ataupun keluarga di lingkungan masyarakatnya.

2. 1. 3. 2 Tingkatan Status Sosial Ekonomi

Klasifikasi status social ekonomi Menurut Coleman dan Cressey dalam Sumardi (2004 : 76) antara lain:

1. Status social ekonomi atas

Kelas social yang berada paling atas dari tingkatan social yang terdiri dari orang-orang yang sangat kaya raya seperti kalangan konglomerat, mereka sering menempati posisi teratas dari kekuasaan. Umumnya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik.

2. Status social ekonomi bawah

Kedudukan seseorang di masyarakat yang diperoleh berdasarkan penggolongan menurut kekayaan dan status sosialnya, dimana harta kekayaan yang dimiliki serta status social yang dimiliki termasuk kurang jika dibandingkan dengan rata-rata masyarakat pada umumnya serta tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Sedangkan tingkat social ekonomi menurut Arifin Noor dalam Sunarto (2004:88) membagi kelas social dalam tiga golongan, yaitu:

1. Kelas atas (upper class) yang berasal dari golongan kaya raya seperti golongan konglomerat, kelompok eksekutif, dan lain lain.
2. Kelas menengah (middle class) biasanya diidentikkan oleh kaum professional dan para pemilik toko dan bisnis yang lebih kecil.

3. Kelas bawah (lower class) adalah golongan yang memperoleh pendapatan atau penerimaan sebagai imbalan terhadap kerja mereka yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan pokoknya.

Setiap keluarga di lingkungan masyarakat tentunya memiliki status social ekonomi yang berbeda dan beragam. Kepemilikan atas harta kekayaan, jabatan yang emban, pekerjaan yang dimiliki dan tingkat pendidikan akan mencirikan status social ekonomi setiap keluarganya.

2. 1. 3. 3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kondisi Sosial Ekonomi

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap manusia memiliki kondisi social ekonomi yang berbeda-beda, ada yang memiliki kondisi social ekonomi yang bagus dan kurang beruntung. Menurut Nasution (2004:25) tingkat status social ekonomi dilihat atau diukur dari pekerjaan orang tua, penghasilan dan kekayaan, tingkat pendidikan orang tua, keadaan rumah dan lokasi, pergaulan dan aktivitas social.

1. Tingkat pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk seorang manusia dalam menjalani hidupnya. Dengan pendidikan maka seseorang akan mencari jati diri yang sebenarnya dalam hidupnya dan pendidikan akan membuat hidup menjadi terarah, dapat bermanfaat bagi orang lain dan akan mengetahui serta mendapatkan apa yang diinginkan.

Tujuan dari pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan sumber daya manusia. Demi tercapainya tujuan pendidikan nasional maka dilaksanakan pendidikan melalui berbagai jalur pendidikan baik formal atau non formal.

2. Pendapatan orang tua

Menurut Sukirno dalam Anwar (2011:47) pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan. Sedangkan menurut Reksoprayitno (2009:79) pendapatan atau income adalah uang yang

diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa bunga dan laba termasuk berbagai tunjangan, seperti kesehatan dan pensiun.

Maka dapat disimpulkan maksud dari pendapatan orang tua adalah pendapatan keseluruhan berupa uang yang dimiliki oleh kedua orang tua dari hasil pekerjaannya baik dari usaha sendiri ataupun bekerja pada orang lain. Semakin besar pendapatan yang dimiliki orang tua semakin tinggi juga status social ekonominya.

3. Kepemilikan aset keluarga

Setiap keluarga pasti memiliki aset baik berupa harta tetap ataupun harta lancar baik berupa emas, tanah, bangunan, perusahaan, tabungan, investasi dan lain lain. Kepemilikan aset keluarga di masyarakat tentunya berbeda-beda seberapa banyak kepemilikan aset keluarga akan mempengaruhi terhadap status social ekonomi keluarga di masyarakat. Keluarga yang memiliki rumah sendiri dengan kualitas yang bagus dan luas dapat dikatakan status social ekonominya termasuk kategori tinggi, akan tetapi keluarga yang memiliki rumah menyewa dengan kualitas rumah yang sederhana maka tingkat status social ekonominya termasuk kategori rendah.

4. Tingkat pemenuhan atau pengeluaran kebutuhan hidup

Pada dasarnya semua kebutuhan dan keinginan manusia di dalam hidup tidak akan lepas dari ekonomi, semakin banyak kebutuhan manusia ingin dicapai tentunya semakin tinggi pengeluaran yang akan di keluarkan dan tentu sebaliknya jika kebutuhan manusia sedikit maka pengeluaran yang dikeluarkannya juga akan sedikit.

5. Pekerjaan orang tua

Pekerjaan setiap orang berbeda-beda, ada yang memiliki pekerjaan sederhana, sedang dan ada yang memiliki pekerjaan dalam kategori tinggi bahkan sangat tinggi dengan pendapatan yang bervariasi. Pekerjaan dapat

diklasifikasikan menjadi enam yaitu professional ahli teknik dan ahli jenis, kepemimpinan dan ketatalaksana, administrasi tat usaha dan sejenisnya, jasa, petani, produksi, serta operator alat angkut.

2. 2 Hasil Penelitian yang Relevan

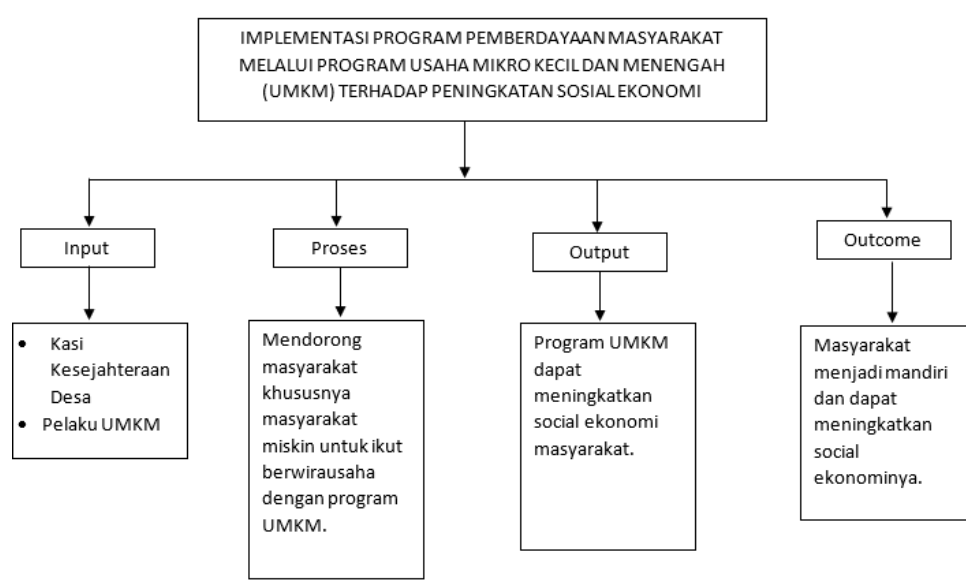
- 1) Hasil penelitian yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Helmi Alhadar, Bakri La Suhu, Marno Wance, Vivi Noviyanti dan Karsan Adam yang berjudul “Pemberdayaan Kelompok Usaha Kecil Masyarakat Desa Madopolo Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian ini difokuskan pada usaha kecil yang melalui program PNPM, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada pemberdayaan masyarakat miskin atau kurang mampu melalui program UMKM.
- 2) Hasil penelitian yang relevan kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rubiyannah, Maria Magdalena Minarsih dan Leonardo Budi Hasiolan yang berjudul “Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Dalam Penanggulangan Kemiskinan”. Penelitian ini menggunakan metode analisis data sebagai upaya pengolahan datanya menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat datanya dapat mudah dipahami. Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitiannya berfokus pada masyarakat yang tinggal di perkotaan dengan keterbatasan ekonomi jika dibandingkan dengan masyarakat kota lainnya yang sebagian besar mempunyai pekerjaan tetap dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada masyarakat desa yang memang sebagian besar masyarakatnya kurang mampu atau kurang memenuhi kebutuhan untuk sehari-harinya.
- 3) Hasil penelitian yang relevan ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wili Guslia yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang penelitiannya difokuskan pada satu fenomena yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam saja. Perbedaan

dari penelitian ini yaitu focus penelitiannya terhadap pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pemberdayaan masyarakat melalui program UMKM.

- 4) Hasil penelitian yang relevan keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Atma Ras yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan”. Penelitian ini berfokus pada program pemerintah yang tidak membangun masyarakat miskin tetapi malah sebaliknya menjadikan masyarakat miskin malas untuk memperbaiki nasibnya. Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitiannya mencakup pada semua aspek tentang pengentasan kemiskinan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya berfokus pada satu program saja yang dapat mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia ini.
- 5) Hasil penelitian yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Marlina Sinaga, Usman Tarigan dan Rosmala Dewi yang berjudul “Peranan Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfokus pada peranan unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu melakukan pemberdayaan melalui program UMKM untuk meningkatkan social ekonomi.

2. 3 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan kerangka konseptual yang terdiri dari *input*, *proses*, *output* dan *outcome*.



Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual

Berdasarkan diagram diatas dapat dijelaskan bahwa Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat di desa Subang Kabupaten Kuningan terdiri dari empat tahapan yaitu tahap input yang merupakan bagian dalam proses pelaksana pemberdayaan ,terdiri dari kasi kesejahteraan desa yang memiliki kewenangan dan pengelolaan kesejahteraan masyarakat di wilayah desa subang, Selanjutnya para pelaku UMKM masyarakat Desa Subang sebagai pelaku dan pelaksana dari kegiatan usaha ini.

Kemudian masuk pada tahap ke dua yaitu poses, dalam tahap ini segala usaha yang dilaksanakan untuk mendorong dan mengembangkan usaha masyarakat agar dapat terus berkembang serta memberikan pendampingan agar dapat menambah pengetahuan dan keterampilan khususnya dalam mengoptimalkan potensi usahanya. Tahap ke tiga adalah Output, dimana ditahap ke tiga ini menggambarkan tujuan dari program yang dilaksanakan ini adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Tahap ke empat yaitu outcome merupakan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, dimana dari kegiatan pemberdayaan masyarakat ini diharapkan dapat menjadikan

masyarakat desa subang menjadi masyarakat yang mandiri khususnya dalam bidang ekonomi.

2.4 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Subang?